



UNIVERSITAS TERBUKA

KAJIAN PEMERINTAHAN DAERAH dari ADMINISTRASI PUBLIK **Prof.Dr. Bhenyamin Hoessien.**

- ❖ Terjemahan istilah (konsep) local government (LG) bergantung pada konteksnya (dalam konteks organ atau fungsi). Bab VI yang menaungi pasal 18 UUD 1945 berjudul pemerintahan daerah.
- ❖ Local bukan berarti daerah tetapi berarti masyarakat bertempat (locality)-pemerintah (an) berbasis politik masyarakat setempat, dan bukan bangsa.

Menurut Edward C. Page (1991)

“to be local implies some control over election. By the community the principles of representative democracy suggests that the influence is exercised of least in part through democratically elected officials who may be expected to represent local citizens and groups. Local elected representative can also provide the focus for forms of participatory democracy through direct citizen involvement or interest group activity.





- ❖ Menurut decentralizaion for nation and local development (1962):
“the term *“local governments”* refers to a political subdivision of a nation or (in a federal system) state which constituted by law and has substantial control of local affairs, including the power to impose taxes. The governing body of such on entity elected or otherwise to locally selected.”
- ❖ Dalam buku yang sama ditegaskan pula bahwa “the term *“local governments”* local are used interchangeably (usually *“local governments”* refers to the system and to the unit)”
- ❖ Di NK (negara kesatuan), *local governments* diciptakan dan dibawahhi oleh pemerintah pusat. Di NF (negara federal), *local governments* diciptakan dan dibawahhi oleh NB (negara bagian).
- ❖ NB (*state, canton, lander, province*) bukan *local governments*. NB(negara bagian) tidak diciptakan oleh Pemerintah Federal. Menurut R.Kranenburg, NB(negara bagian) memiliki “constituant”, sedangkan *local governments* tidak memilikinya.
- ❖ Seperti di Indonesia pembentukan *local governments* (DO) oleh pemerintah pusat atau NB (negara bagian) dengan desentralisasi. Dalam bacaan berbahasa Inggris , desentralisasi disebut *decentraliz(s)ation*. Tidak sama dengan dekonsentrasi (*deconcentration*).



UNIVERSITAS TERBUKA

- ❖ Tetapi terdapat pula yang memasukkan deconcentration sebagai subkonsep decentralization bersama sub konsep devolution. Subkonsep devolution sebagai padanan desentralisasi Indonesia
- ❖ Secara ringkas
 - ❖ (1). Decentralization = deconcentration
 - ❖ (2). Decentralization = deconcentration + devolution
 - ❖ (3). Decentralization = administratif decentralization + politiceal (democratice) decentralization.
 - ❖ (4). Decentralization = administratif (bureaucratic) decentralization
 - ❖ (5). Decentralization = devolution = politiceal decentralization = democratic decentralization.
- ❖ Devolution the local conferring of powers to discharge specified or residual functions up informally decentralization, the delegation of authority adequate for the discharge of specified functions to staff of a central departement who are situated outside the headquartes
- ❖ Desentralisasi bukan tujuan, tetapi cara untuk mencapai tujuan. Tujuan banyak, terdapat skala prioritas: model structural efficien dan lokal democracy.

Sambungan

Desentralisasi	Dekonsentrasi
Pembentukan Lokal Government (Daerah Otonomi)	Pembentukan Instansi Vertikal (Wakil Pemerintah)
Penyerahan Wewenang Pemerintahan Kepada Local Governments (Daerah Otonomi)	Pelimpahan Wewenang Pemerintahan Instansi Vertikal (Wakil Pemerintah)
Otonomi Daerah	Tidak ada Otonomi Daerah
Hubungan antara Daerah Otonomi (Lokal Government dan Pemerintahan Organisasi	Hubungan antara Instansi Vertikal (Wakil Pemerintah) dan pihak yang melimpahkan wewenang pemerintahan: Intra Organisasi

- ❖ Otonomi Daerah :
Wewenang Pemerintahan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai berbagai urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat.
- ❖ Open end arrangement (general competence), ultravires doctrine



Kajian Penelitian Administrasi Publik dari Perspektif Pemerintahan Daerah

- ❖ Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah
- ❖ Konsep Pemerintahan Daerah (local government) ----→ (antara konsep das sollen dengan das sein)
- ❖ Pola Pemerintahan Daerah (Simetris atau Asimetris)
- ❖ Pola Hubungan Sistem Pemerintahan
- ❖ Sistem Sentralisasi atau Desentralisasi atau Dekonsentrasi Pemerintahan